

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekses likuiditas merupakan jumlah cadangan bank yang didepositokan di bank sentral ditambah dengan uang kas yang disimpan untuk keperluan operasional harian bank (cash in vaults), dikurangi kewajiban Giro Wajib Minimum (Reserve Requirement), (Saxegaard, 2006). Pengertian ekses likuiditas tersebut merupakan dalam konteks likuiditas yang digunakan untuk berjaga-jaga (precautionary) atau dapat dianggap sebagai perilaku optimisasi oleh bank. Dalam porsi tertentu ekses likuiditas diperlukan sebagai cadangan bagi perbankan terhadap ketidakpastian penarikan dana oleh nasabah maupun volatilitas nilai tukar yang dapat mempengaruhi modal perbankan.

Namun tidak semua ekses likuiditas bersumber dari perilaku bank dengan maksud untuk berjaga-jaga. Dalam kondisi tertentu, ekses likuiditas yang dimiliki oleh bank bukanlah bersifat sebagai cadangan untuk berjaga-jaga. Kondisi tersebut dapat berupa likuiditas yang tidak diperlukan dan bahkan dapat berpotensi memberikan efek negatif bagi efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter. Ekses likuiditas yang seperti ini juga dapat disebut likuiditas yang tidak terkendali (involuntary).

Sejarah ekses likuiditas muncul pertama kali di perbankan Indonesia dimulai ketika terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997. Pada saat itu, memburuknya kondisi perbankan Indonesia akibat besarnya kredit bermasalah dan turunnya kepercayaan masyarakat pada perbankan. Hal ini mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan likuiditas kepada bank-bank yang tengah mengalami kesulitan hebat. Bantuan ini dilakukan demi menyelamatkan sistem perbankan secara keseluruhan.

Namun demikian, keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah untuk membantu stabilitas sistem perbankan pada saat itu menyebabkan Bank Indonesia ikut terlibat dalam memberikan dana talangan kepada pemerintah. Bantuan Bank Indonesia tersebut dikenal dengan sebutan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Selain itu program lain yang diambil untuk menyelamatkan sistem perbankan pada saat itu, yaitu program restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan. Program ini dilakukan dengan cara menerbitkan obligasi rekap sebagai penyertaan modal pemerintah kepada bank-bank, sebagai upaya memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan peraturan BI. Dua hal tersebut, dana talangan BLBI dan program rekapitalisasi perbankan tersebut yang menjadi latar belakang melonjaknya ekses likuiditas di sistem perbankan Indonesia dan berlangsung secara persisten hingga sampai saat ini.

Namun, kondisi sekarang dengan dulu sudah jauh berbeda. Dulu meski krisis melanda, ekses likuiditasnya tidak terlalu besar, tidak seperti sekarang ini, dimana likuiditas di pasar global semakin meningkat. Ditengah terus membaiknya

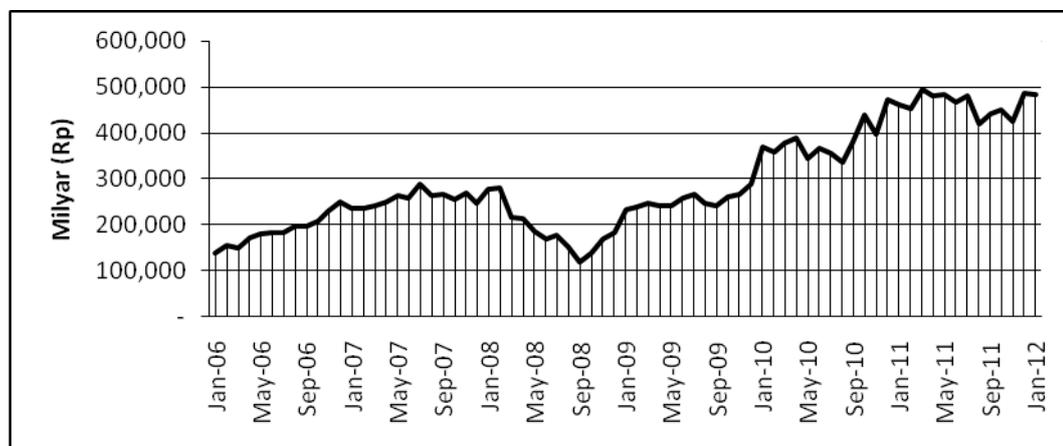
sentimen di pasar keuangan global, berbagai kebijakan tersebut berkontribusi pada positifnya perkembangan berbagai indikator ekonomi domestik. Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan *yield* Surat Utang Negara (SUN) terus mencatatkan perbaikan, nilai tukar rupiah bergerak dengan cenderung menguat, dan sejalan dengan perkembangan tersebut ekspektasi inflasi terus menurun.

Namun demikian, membaiknya kondisi pasar keuangan serta penurunan BI Rate belum direspons secara optimal oleh perbankan domestik. Hal ini tercermin pada masih relative tingginya suku bunga kredit yang turut berkontribusi pada lemahnya permintaan kredit. Tertahannya pengucuran kredit tersebut salah satu penyebab semakin meningkatnya stok eksekusi likuiditas industri perbankan seperti yang terjadi saat ini.

Ekses likuiditas yang berangsur-angsur ini pada perkembangan selanjutnya seringkali menimbulkan permasalahan bagi perekonomian secara umum maupun permasalahan bagi bank sentral selaku otoritas moneter. Dalam konteks bank sentral, eksekusi likuiditas akan mengakibatkan berkurangnya efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter dalam hal ini terjadi terutama dalam mempengaruhi sisi permintaan dan mencapai sasaran inflasi.

Selain itu, eksekusi likuiditas di sistem perbankan akan mendorong bank sentral untuk menyerap kelebihan likuiditas tersebut dengan melalui operasi moneter. Operasi moneter yang dilakukan bank sentral ini dilakukan dalam bentuk lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) maupun Fasilitas Bank Indonesia (Fasbi).

Operasi moneter ini dilakukan agar tidak memberikan tekanan, baik dipasar keuangan maupun di perekonomian. Namun jika jumlah eksek likuiditas terlampau besar dan berkelanjutan, hal ini akan dapat memberikan tekanan bagi neraca bank sentral. Hal ini dikarenakan bank sentral harus membayar biaya bunga bagi penempatan perbankan di SBI maupun Fasbi. Tercatat hingga Januari 2012, eksek likuiditas yang diserap oleh Operasi Pasar Terbuka (OPT) mencapai Rp 481 triliun.



Sumber: Bank Indonesia

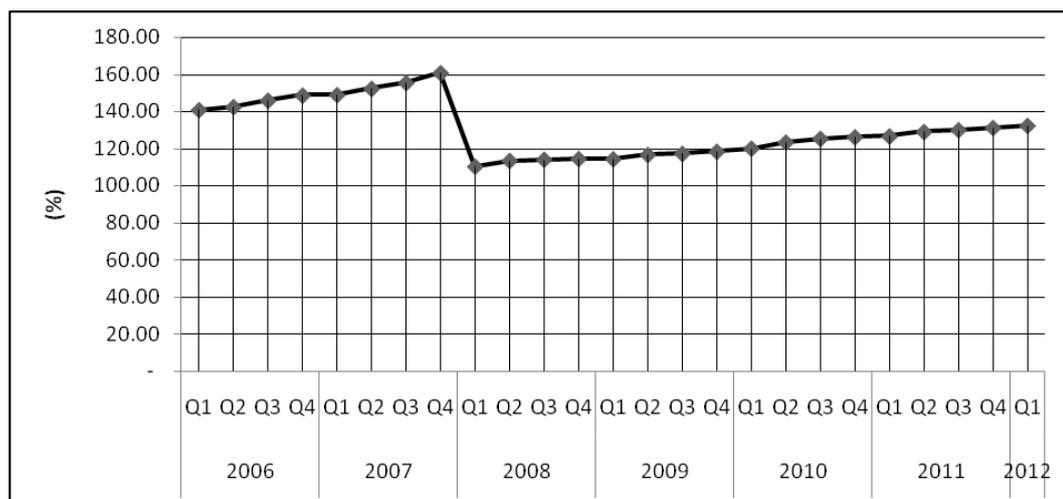
Gambar 1. 1 Perkembangan Operasi Moneter Periode Januari 2006 hingga Januari 2012

Sementara bagi perekonomian, dampak eksek likuiditas dapat berupa keengganan perbankan untuk menyalurkan dananya dalam bentuk kredit yang produktif.

Keengganan tersebut karena memandang risiko yang masih tinggi di sektor riil, sehingga pelaku bank lebih memilih untuk menempatkan kelebihan likuiditas tersebut dalam bentuk instrumen moneter, seperti SBI atau Fasbi. Akibat dari penempatan kelebihan likuiditas yang semestinya disalurkan di sektor riil, sumber dana di sektor riil menjadi terbatas. Sehingga pada akhirnya akan berakibat pada perubahan harga didalam sektor riil.

Ekses likuiditas dalam penyaluran dana yang kurang lancar akan berdampak pada perubahan tingkat harga umum di dalam sektor riil. Perubahan tingkat harga umum tersebut dapat berperan sebagai tujuan transaksi, menurut teori permintaan uang klasik. Apabila terjadi penurunan harga barang yang menyebabkan nilai uang riil meningkat, maka permintaan uang juga akan menurun. Sedangkan sebaliknya, apabila terjadi kenaikan harga barang yang disebabkan tingkat harga umum yang meningkat akan menyebabkan nilai uang riil turun, sehingga permintaan uang meningkat.

Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1.2 di bawah, pada awal tahun 2012 tingkat harga umum mencapai 132%. Peningkatan permintaan uang tersebut akan menyebabkan terjadinya ekses likuiditas, yang kemudian akan berpengaruh pada kebijakan moneter. Permasalahan yang diakibatkan oleh ekses likuiditas yang tak terkendali ini harus diantisipasi dengan baik, agar tidak persisten dan semakin menimbulkan efek yang negatif di perekonomian.



Sumber: Bank Indonesia

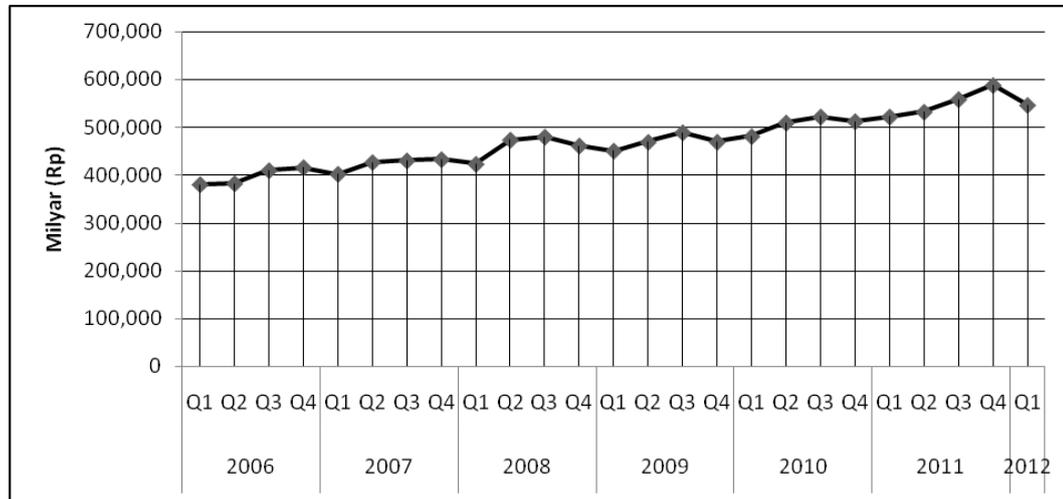
Gambar 1. 2 Perkembangan Tingkat Harga Umum Periode 2006:Q1 hingga 2012:Q1

Porsi eksekutif likuiditas yang memberikan dampak yang negatif bagi efektivitas kebijakan moneter diatas, tidak seluruhnya berdampak negatif. Dalam porsi lain, eksekutif likuiditas diperlukan sebagai penyangga bagi perbankan. Hal ini terjadi karena eksekutif likuiditas di sini dimaksudkan untuk menjaga ketidakpastian terhadap penarikan dana oleh nasabah maupun volatilitas nilai tukar yang dapat mempengaruhi modal perbankan. Dalam porsi yang diperlukan ini, eksekutif likuiditas disebut sebagai eksekutif likuiditas untuk berjaga-jaga (precautionary).

Menurut Keynes, dalam teori permintaan uang, ada tiga motif dalam memegang uang, yaitu motif transaksi (transaction motive), motif berjaga-jaga (precautionary motive), dan motif spekulasi (speculation motive). Permintaan uang yang muncul sebagai akibat dari motif transaksi ini didasarkan pada anggapan bahwa seseorang berminat untuk memegang uang dimaksudkan untuk memenuhi dan memperlancar transaksi yang mereka lakukan. Di sini dianggap bahwa permintaan uang untuk tujuan transaksi tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional.

Pendapatan yang dilakukan sebagai maksud untuk memenuhi dan memperlancar jalannya transaksi, merupakan salah satu motif untuk sebagian orang untuk memegang uangnya. Tingkat pendapatan nasional riil sering dilakukan untuk melakukan penelitian tentang pengaruhnya terhadap stabilitas permintaan uang. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Banatul Hayati (2006), yang memasukkan variabel tingkat pendapatan riil dalam menentukan stabilitas uang dalam penelitiannya. Begitu juga dikalangan perbankan, pendapatan riil penting untuk

memenuhi dan memperlancar jalannya transaksi yang akan dilakukan. Tercatat hingga 2012 triwulan pertama, pendapatan nasional riil mencapai Rp 546 triliun seperti yang dilihat pada Gambar 1.3 di bawah ini.



Sumber: Bank Indonesia

Gambar 1. 3 Pendapatan Riil Periode 2006:Q1 hingga 2012:Q1

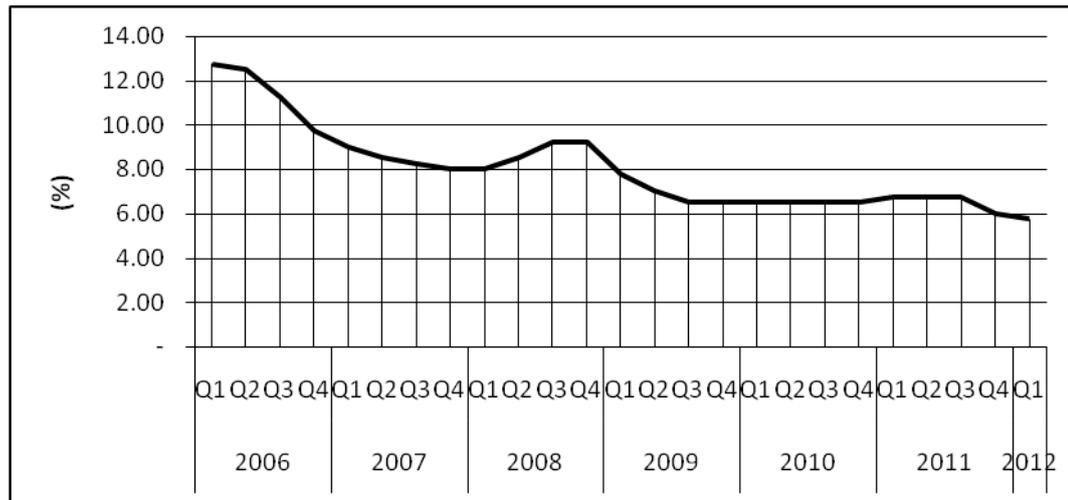
Disamping untuk membiayai transaksi, uang diminta pula untuk menghadapi keadaan mendesak atau masalah penting lain di masa depan. Ada kalanya keadaan masa depan semakin bertambah baik, tetapi ada kalanya masalah-masalah buruk akan dihadapi. Untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti, terutama untuk menghadapi keperluan yang mendesak, sebagian uang disisihkan untuk menghadapi masalah di masa depan. Uang yang disisihkan untuk tujuan ini dinamakan permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga.

Menurut teori permintaan uang Keynes, pendapatan riil juga berpengaruh terhadap permintaan uang sebagai motif berjaga-jaga (precautionary). Di mana apabila semakin besar tingkat pendapatan, maka permintaan uang untuk berjaga-

jaga juga akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, apabila semakin kecil tingkat pendapatan, maka permintaan uang untuk berjaga-jaga pun semakin rendah. Ketidakpastian mengenai penerimaan dan pengeluaranlah yang menjadi pertimbangan untuk meningkatkan permintaan uang.

Dalam ekonomi, di mana institusi keuangan sudah berkembang, masyarakat menggunakan pula uangnya untuk tujuan spekulasi, yaitu disimpan atau digunakan untuk membeli surat-surat berharga seperti obligasi pemerintah, saham perusahaan, dan lain-lain. Penyimpanan uang untuk tujuan spekulasi ini juga merupakan salah satu motif penyimpanan uang yang dikemukakan oleh Keynes. Dalam menggunakan uang untuk tujuan spekulasi ini, suku bunga atau deviden yang diperoleh dari memiliki surat-surat berharga tersebut sangat penting dalam menentukan besarnya jumlah permintaan uang. (Sukirno, 2004)

Tidak sama halnya seperti tujuan transaksi dan berjaga-jaga yang ditentukan oleh pendapatan, tujuan spekulasi ditentukan oleh suku bunga. Apabila suku bunga atau deviden surat-surat berharga itu tinggi, masyarakat akan menggunakan uang untuk membeli surat-surat berharga tersebut. Akan tetapi apabila suku bunga dan tingkat pengembalian modal rendah, mereka akan lebih suka menyimpan uangnya daripada membeli surat-surat berharga. Perkembangan suku bunga pada periode 2006:Q1 sampai 2012:Q1 dapat dilihat pada Gambar 1.4 di bawah ini.



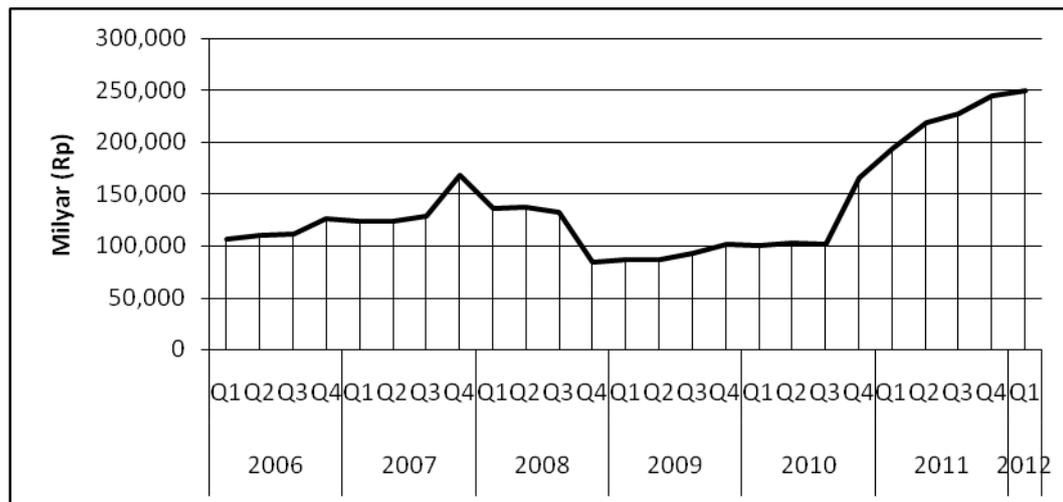
Sumber : Bank Indonesia

Gambar 1.4 Perkembangan suku bunga BI rate periode 2006:Q1 sampai 2012:Q1

Dalam mengatasi eksekusi likuiditas perbankan pada bank umum, pemerintah memerlukan beberapa regulasi untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan tingkat investasi yang terkendali. Hal tersebut dapat terwujud dengan salah satunya yaitu dengan cara memainkan besarnya cadangan minimum yang harus disetorkan oleh masing-masing bank kepada Bank Indonesia, yang dikenal sebagai Giro Wajib Minimum (GWM). Kenaikan ini dimaksud untuk memelihara kestabilan moneter dan menjadikan perbankan lebih memiliki daya saing.

Dapat dilihat pada Gambar 1.5 dibawah ini, perkembangan GWM pada tahun 2010 hingga 2011 meningkat karena terjadi perubahan kebijakan moneter pada tahun 2010 yang menetapkan GWM sebesar 8% pada tahun tersebut. Kenaikan GWM ini akan berdampak langsung terhadap perbankan Indonesia, karena GWM ini dapat memicu untuk bank menyediakan pencadangan lebih tinggi di Bank

Indonesia. Dengan adanya penetapan kebijakan GWM dari otoritas moneter, bank harus menyediakan likuiditas yang lebih untuk di berikan kepada Bank Indonesia. Hal ini yang akan mengakibatkan semakin berkurangnya likuiditas bank umum, sehingga ekspansi kredit bank akan semakin kecil.



Sumber : Bank Indonesia

Gambar 1.5 Perkembangan GWM periode 2006:Q1 sampai 2012:Q1

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan menganalisis sejauh mana variabel-variabel yang berupa tingkat harga umum, pendapatan riil, suku bunga dan Giro Wajib Minimum berpengaruh terhadap Ekses Likuiditas perbankan, khususnya bank umum pada periode 2006:Q1 sampai dengan 2012:Q1 di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

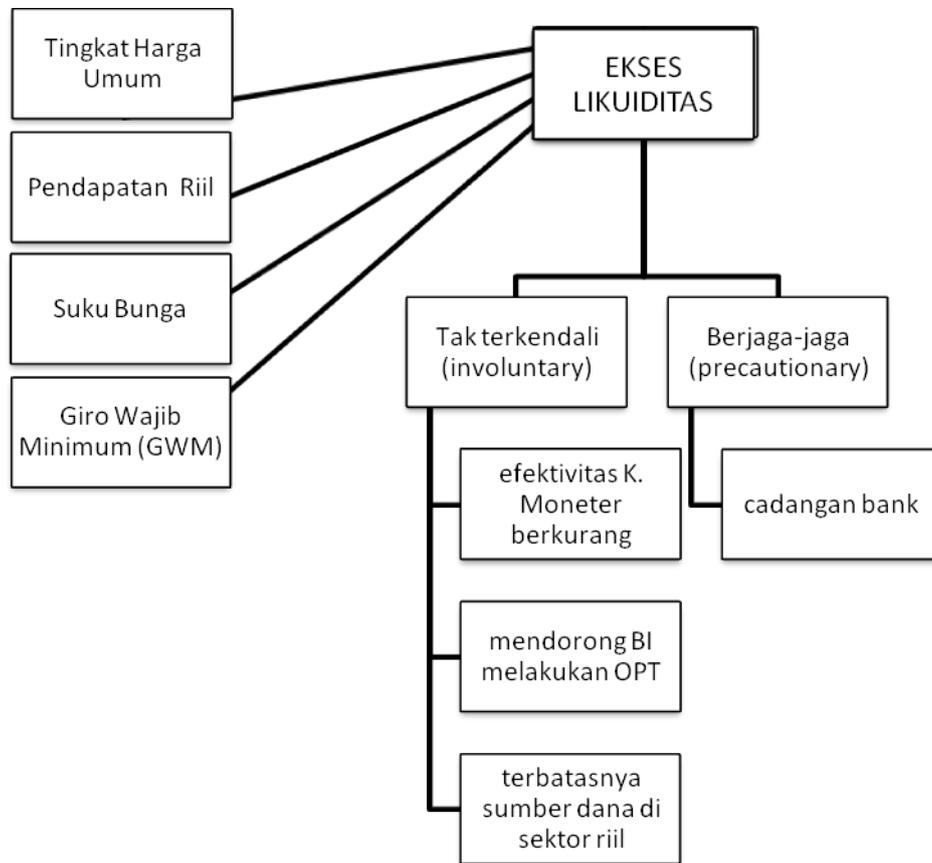
1. Seberapa besar pengaruh tingkat harga umum terhadap Ekses Likuiditas perbankan di Indonesia.
2. Seberapa besar pengaruh pendapatan riil terhadap Ekses Likuiditas perbankan di Indonesia.
3. Seberapa besar pengaruh suku bunga terhadap Ekses Likuiditas perbankan di Indonesia.
4. Seberapa besar pengaruh Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap Ekses Likuiditas perbankan di Indonesia.

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis seberapa besar pengaruh tingkat harga umum terhadap Ekses Likuiditas perbankan di Indonesia.
2. Menganalisis seberapa besar pengaruh pendapatan riil terhadap Ekses Likuiditas perbankan di Indonesia.
3. Menganalisis seberapa besar pengaruh suku bunga terhadap Ekses Likuiditas perbankan di Indonesia.
4. Menganalisis seberapa besar pengaruh Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap Ekses Likuiditas perbankan di Indonesia.

D. Kerangka Pikir



Masalah eksekusi likuiditas dapat ditimbulkan dari faktor-faktor yang berupa tingkat harga umum, pendapatan riil, suku bunga, yang juga merupakan faktor dari permintaan uang dan Giro Wajib Minimum yang merupakan kebijakan moneter. Terjadinya eksekusi likuiditas di perbankan Indonesia yang ditimbulkan dari faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan dampak yang positif dan negatif di perekonomian. Eksekusi likuiditas yang sering terjadi adalah eksekusi likuiditas yang menimbulkan efek negatif di perekonomian. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan efek yang negatif bagi perekonomian, eksekusi likuiditas tersebut perlu dicegah.

Ekses likuiditas terdiri dari eksek likuiditas yang memberikan dampak positif atau sebagai bentuk penjagaan (precautionary), dan eksek likuiditas yang memberi dampak negatif atau eksek likuiditas tak terkendali (involuntary). Eksek likuiditas dalam bentuk penjagaan ini berguna sebagai cadangan bank. Cadangan tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya ketidakpastian terhadap penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah. Sehingga jika hal tersebut terjadi tidak akan mempengaruhi permodalan perbankan.

Sedangkan, eksek likuiditas yang memberikan dampak negatif dapat menimbulkan permasalahan bagi bank sentral selaku otoritas moneter, maupun bagi perekonomian secara umum. Dalam konteks bank sentral, eksek likuiditas dapat menyebabkan berkurangnya efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter. Hal ini terutama dapat mempengaruhi dari segi permintaan dan sasaran inflasi.

Selain itu, eksek likuiditas di sistem perbankan akan mendorong bank sentral untuk menyerap kelebihan likuiditas tersebut melalui operasi moneter. Operasi moneter tersebut dalam bentuk lelang SBI atau Fasbi agar tidak memberikan tekanan baik di pasar keuangan maupun di perekonomian. Namun jika jumlah eksek likuiditas semakin besar dan persisten, hal ini akan dapat memberikan tekanan bagi kesinambungan neraca bank sentral. Karena bank sentral harus membayar biaya bunga bagi penempatan dana perbankan di SBI maupun di Fasbi.

Bagi perekonomian, ekses likuiditas juga berdampak negatif bagi perekonomian. Dampak ekses likuiditas tersebut berupa keengganan perbankan untuk menyalurkan dana yang didapat dalam bentuk kredit kredit yang produktif. keengganan tersebut terjadi dikarenakan memandang risiko yang masih tinggi di sektor riil. Sehingga bank lebih memilih untuk menempatkan dananya dalam bentuk instrumen moneter. Bila hal ini terjadi, akan berakibat sumber dana di sektor riil menjadi terbatas dan bila tersediapun harganya menjadi lebih mahal. (Bathaluddin, 2012)

E. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Diduga tingkat harga umum berpengaruh negatif terhadap Ekses Likuiditas pada perbankan di Indonesia.
2. Diduga pendapatan riil berpengaruh positif terhadap Ekses Likuiditas pada perbankan di Indonesia.
3. Diduga suku bunga berpengaruh negatif terhadap Ekses Likuiditas pada perbankan di Indonesia.
4. Diduga Giro Wajib Minimum (GWM) berpengaruh negatif terhadap Ekses Likuiditas pada perbankan di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara singkat isi dari penulisan skripsi ini, penelitian ini dibagi menjadi 5 bab. Bab-bab tersebut terdiri dari bab pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil perhitungan dan pembahasan, dan simpulan dan saran.

Bab pertama yaitu Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pikir, hipotesis, dan sistematika penulisan. Bab kedua yaitu Landasan Teori, bab ini terdiri dari tinjauan teoritis dan tinjauan empirik, yang berisi tentang pengertian likuiditas, teori permintaan uang Keynes, dan pengertian-penertian mengenai tingkat harga umum, pendapatan riil, suku bunga, dan giro wajib minimum. Bab ketiga yaitu Metode Penelitian, bab ini berisi tentang penulisan jenis dan sumber data, batasan ukuran variabel, model dan metode analisis dan pengujian hipotesis. Bab keempat yaitu Hasil dan Pembahasan, berisi tentang gambaran umum hasil penelitian yang telah dilakukan dan membahasnya sesuai dengan tujuan penelitian. Bab kelima yaitu Simpulan dan Saran, bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran mengenai keterbatasan penelitian ini.